



## The Effectiveness Of The KIP Kuliah Program In Ensuring Students' Continuation Of Students' Students And Preventing Drop-Out For Students After Scholarship Termination At Prof. Dr. Hazairin, Sh. University Of Bengkulu

### Efektivitas Program Kip Kuliah Dalam Menjamin Keberlangsungan Studi Mahasiswa Dan Pencegahan Drop-Out Bagi Mahasiswa Pasca-Pemutusan Beasiswa Di Universitas Prof. Dr. Hazairin, Sh Bengkulu



Radittyallah Afyudha Pratama<sup>a</sup>  
Harmiati<sup>b</sup>  
Henny Aprianty<sup>c</sup>

#### Article history:

Submitted: 04-05-2026

Revised: 14-06-2026

Accepted: 23-06-2026

#### Keywords:

Program Effectiveness, KIP Kuliah, Study Continuity, Drop-Out, Post-Scholarship Termination

#### Abstract

*This study evaluates the effectiveness of the KIP Kuliah Program in ensuring study continuity and preventing the risk of dropout for students following scholarship termination at Prof. Dr. Hazairin University, SH, Bengkulu. The research background is based on the phenomenon of beneficiary students experiencing scholarship termination midway through their studies during the 2022–2024 period, which has the potential to cause them to drop out of college. The theoretical basis used is Richard M. Steers' (1980) theory of organizational effectiveness, adapted into three main dimensions: target accuracy, implementation process, and achievement of results, as well as influencing factors (supporting and inhibiting factors). The research method employed a descriptive qualitative approach, with informants selected through purposive sampling. Data collection was conducted using a triangulation method encompassing three main techniques: in-depth interviews, observation, and documentation. The results show that the administrative dimension operates systematically, but the mitigation process is weak due to the unilateral deactivation of scholarships by the system without institutional guidance. Supporting factors for effectiveness are the rectorate's UKT installment dispensation policy and the moral support of lecturers. The inhibiting factor is the university's fiscal limitations in providing alternative long-term internal scholarships. In conclusion, the continuity of student studies after scholarship termination was successfully maintained not because of a structured mitigation system from the institution, but rather by the students' own resilience, financial independence, and economic adaptation strategies.*

**Keywords:** Program Effectiveness, KIP Kuliah, Study Continuity, Drop-Out, Post-Scholarship Termination

<sup>a</sup> Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Indonesia

<sup>b</sup> Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Indonesia

<sup>c</sup> Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Indonesia

**Abstrak**

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas Program KIP Kuliah dalam menjamin keberlangsungan studi dan mencegah risiko drop-out bagi mahasiswa pasca-pemutusan beasiswa di Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu. Latar belakang penelitian didasari oleh fenomena mahasiswa penerima manfaat yang mengalami pemutusan beasiswa di tengah masa studi selama pada masa periode 2022–2024 yang berpotensi menyebabkan mahasiswa putus kuliah. Landasan teoritis yang digunakan adalah teori efektivitas organisasi dari Richard M. Steers (1980), yang diadaptasi ke dalam tiga dimensi utama : ketepatan sasaran, proses pelaksanaan, dan pencapaian hasil, serta faktor yang mempengaruhi (faktor pendukung dan faktor penghambat). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan penentuan informan melalui purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan metode triangulasi yang mencakup tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan dimensi administrasi berjalan sistematis, namun lemah pada proses mitigasi karena adanya penonaktifan beasiswa sepihak oleh sistem tanpa pembinaan institusi. Faktor pendukung efektivitas adalah adanya kebijakan dispensasi cicilan UKT dari rektorat dan dukungan moral dosen. Faktor penghambatnya adalah keterbatasan fiskal kampus dalam menyediakan beasiswa internal alternatif jangka panjang. Kesimpulannya, keberlangsungan studi mahasiswa pasca-pemutusan beasiswa berhasil dipertahankan bukan karena adanya sistem mitigasi terstruktur dari institusi, melainkan didorong oleh resiliensi, kemandirian finansial, dan strategi adaptasi ekonomi dari mahasiswa itu sendiri.

***Kata Kunci : Efektivitas Program, KIP Kuliah, Keberlangsungan Studi, Drop-Out, Pasca-Pemutusan Beasiswa***

*JURNAL ISIP VOICE Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ©2026.  
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).*

---

***Corresponding author:***

Radittyallah Afyudha Pratama\*

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

*Email address:* [radittyallah354@gmail.com](mailto:radittyallah354@gmail.com)

**1. Pendahuluan**

Pendidikan tinggi merupakan pilar krusial dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mobilitas sosial masyarakat. Guna memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu, pemerintah menyelenggarakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang memberikan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup. Secara ideal, program ini diharapkan mampu menghilangkan hambatan ekonomi yang berisiko menyebabkan mahasiswa putus kuliah atau *drop-out*. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas program ini tidak hanya bergantung pada bantuan finansial semata, melainkan juga pada kualitas pendampingan, monitoring, dan manajemen internal perguruan tinggi. Di Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH (Unihaz), fenomena pemutusan beasiswa di tengah masa studi selama periode 2022–2024 telah menciptakan risiko keberlangsungan studi bagi mahasiswa. Terdapat 69 mahasiswa yang mengalami kendala studi atau *drop-out* dalam kurun waktu tersebut, dengan tren risiko yang meningkat pada tahun 2024.

Penelitian ini menjadi krusial karena adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat lokal, khususnya dalam hal mitigasi risiko bagi mahasiswa pasca-pemutusan beasiswa. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memotret tata kelola universitas dalam mendukung keberlangsungan studi mahasiswanya.

Sejauh ini, masih ditemukan kasus di mana mahasiswa mengalami penurunan motivasi belajar dan kesulitan ekonomi setelah beasiswa dicabut, yang menuntut adanya solusi administratif yang lebih responsif. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Program KIP Kuliah dalam menjamin keberlangsungan studi mahasiswa serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Fokus utamanya adalah membedakan mekanisme mitigasi institusional yang dilakukan pihak universitas terhadap mahasiswa terdampak.

Relevansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam aspek evaluasi kebijakan pendidikan dan implementasi program bantuan. Penelitian ini mengisi celah (*research gap*) literatur terkait strategi adaptasi mahasiswa pasca-pemutusan beasiswa dan peran manajemen internal kampus sebagai jaring pengaman bagi penerima manfaat yang mengalami krisis finansial di tengah studi. Pertanyaan penelitian yang dijawab dalam kajian ini adalah: Bagaimanakah efektivitas Program KIP Kuliah dalam mencegah *drop-out* mahasiswa di Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH? Selain itu, faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan program tersebut di lingkungan universitas?

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pengelola perguruan tinggi dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pendampingan mahasiswa yang lebih efektif, adil, dan manusiawi. Dengan memadukan data statistik dan pengalaman informan, kajian ini diharapkan mampu mendorong perbaikan tata kelola kebijakan pendidikan agar tetap tepat sasaran dan berkelanjutan.

### Data Statistik Penerima KIP Kuliah

(Tabel 1.1 telah diperbarui pada draft awal untuk mencakup data tahun 2022-2024)

Tahun	Jumlah Penerima KIP	Mahasiswa Dropout/Bermasalah
2022	298	20
2023	469	20
2024	394	29
<b>Total</b>	<b>1.161</b>	<b>69</b>

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2026

## 2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam efektivitas Program KIP Kuliah di Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Subjek penelitian dipilih melalui teknik *purposive sampling* dengan informan yang terdiri dari pihak kemahasiswaan dan mahasiswa terdampak, kemudian dilakukan pengumpulan data melalui metode triangulasi yang mencakup wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, teknik analisis yang digunakan adalah model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menghasilkan temuan yang komprehensif mengenai keberlangsungan studi mahasiswa.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Hasil Penelitian

#### Efektivitas Program KIP Kuliah

Efektivitas program KIP Kuliah di Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH (Unihaz) diukur melalui aspek ketepatan sasaran, proses pelaksanaan, dan pencapaian hasil dengan merujuk pada regulasi serta sistem administrasi yang terintegrasi.

**a. Ketepatan Sasaran Penerima** Proses penentuan penerima KIP Kuliah dilakukan secara sistematis melalui integrasi data kementerian dan verifikasi manual. Kabag Kemahasiswaan (2022-2024), Bapak Muhar Jaya, menjelaskan:

*"Pendaftaran dilakukan secara online. Sistem pendaftaran online dari Kementerian Pendidikan ini sudah sangat baik karena terintegrasi langsung dengan kementerian lain. Jika data mereka di Dapodik sudah sesuai, baru*

setelah itu kami dari pihak panitia kampus masing-masing melakukan verifikasi secara manual" (Wawancara 10 Mei 2026, pukul 10.05 WIB).

Terkait evaluasi, Bapak Joni (Kabag Kemahasiswaan 2025-sekarang) menegaskan:

"Proses evaluasi dilakukan dengan meninjau berbagai aspek akademik, yakni pemeriksaan data indeks prestasi, keaktifan perkuliahan, jumlah SKS, serta kepatuhan terhadap aturan akademik kampus. Selain itu, pihak universitas melakukan koordinasi intensif dengan program studi untuk memvalidasi kondisi nyata mahasiswa sebelum memberikan keputusan akhir" (Wawancara 10 Mei 2026, pukul 15.15 WIB).

Bapak Adi Candra (Staf Kemahasiswaan 2022-2024) menambahkan:

"Kami biasanya sudah melakukan sosialisasi sejak awal kepada seluruh calon penerima KIP beserta orang tuanya, kemudian apabila ditemukan adanya pelanggaran, kami tidak langsung melakukan pemutusan beasiswa. Biasanya mahasiswa terlebih dahulu kami panggil untuk dilakukan pembinaan dan diberikan arahan" (Wawancara 10 Mei 2026, pukul 14.15 WIB).

Namun, temuan lapangan menunjukkan disparitas pengalaman. Amina menyatakan:

"Waktu itu saya dikasih tahu kalau status KIP saya berubah karena status pernikahan/Sebelumnya tidak ada pemeriksaan ulang kondisi ekonomi atau wawancara khusus" (Wawancara 8 Mei 2026, pukul 11.03 WIB).

Hal serupa diungkapkan Marsanda Puji:

"Sebelum keputusan itu, tidak ada pemeriksaan ulang mengenai kondisi ekonomi saya ataupun wawancara khusus dari pihak kampus" (Wawancara 8 Mei 2026, pukul 15.10 WIB).

Endo menambahkan:

"Pihak Unihaz tidak melakukan peninjauan ekonomi ataupun wawancara ulang sama sekali sebelum keputusan diambil / Tidak ada proses pemanggilan atau surat penjelasan mendalam" (Wawancara 9 Mei 2026, pukul 12.15 WIB).

Rika menyatakan:

"Tidak ada cek kondisi atau apapun, Tidak ada kabar" (Wawancara 9 Mei 2026, pukul 14.12 WIB).

Meski demikian, Hera memiliki pengalaman berbeda: "Dipanggil langsung untuk menghadap kemudian diberi penjelasan" (Wawancara 11 Mei 2026, pukul 10.05 WIB).

#### **b. Proses Pelaksanaan** Bapak Muhar Jaya menyatakan:

"Terkait mekanismenya, jika mahasiswa melakukan pelanggaran, tidak langsung dicabut melainkan kami bina dulu. Untuk pelanggaran yang tidak mengandung unsur pidana, kami berikan pembinaan dan kesempatan untuk memperbaiki diri/Aturannya adalah dilakukan pembinaan sampai dua kali" (Wawancara 10 Mei 2026, pukul 10.10 WIB). Bapak Joni menambahkan:

"Meski pemutusan beasiswa membebani ekonomi dan fokus belajar mahasiswa, Unihaz berupaya mencegah drop-out melalui dispensasi cicilan UKT serta pemberian pendampingan dan motivasi" (Wawancara 10 Mei 2026, pukul 15.25 WIB).

Bapak Adi Candra menjelaskan:

"Pengelola juga aktif memberikan pemberitahuan rutin melalui grup WhatsApp bagi penerima KIP Kuliah. Biasanya kami mengingatkan terkait kedisiplinan akademik, kewajiban menjaga IPK, etika sebagai penerima bantuan / Komunikasi melalui grup WA cukup membantu karena informasi dapat disampaikan secara cepat dan berkelanjutan" (Wawancara 10 Mei 2026, pukul 14.24 WIB).

Mahasiswa memberikan keterangan berbeda terkait alur informasi. Amina menjelaskan:

"Pihak kampus memberi tahu lewat pengumuman di grup WhatsApp mahasiswa dan juga muncul perubahan status di sistem SIAKAD / Tidak ada surat resmi yang dikirim ke alamat rumah" (Wawancara 8 Mei 2026, pukul 11.08 WIB).

Marsanda Puji menyatakan:

"Saya mengetahui informasi penghentian KIP Kuliah dari pihak kampus bahwa mahasiswa yang sudah menikah tidak bisa lagi menerima bantuan. Tidak ada penjelasan khusus ataupun proses panjang sebelumnya" (Wawancara 8 Mei 2026, pukul 15.18 WIB).

Endo menyatakan:

"Pemutusan terjadi otomatis karena aturan kampus melarang penerima KIP Kuliah berstatus menikah / Tidak ada proses pemanggilan atau surat penjelasan mendalam" (Wawancara 9 Mei 2026, pukul 12.21 WIB).

Rika menyatakan:

"Tidak ada cek kondisi atau apapun/Tidak ada kabar" (Wawancara 9 Mei 2026, pukul 14.17 WIB).

Namun, Hera kembali menyatakan:

"Dipanggil langsung untuk menghadap kemudian diberi penjelasan" (Wawancara 11 Mei 2026, pukul 10.11 WIB).

**c. Pencapaian Hasil** Bapak Muhar Jaya menyatakan:

"Semua itu tergantung pada iktikad mahasiswanya. Makanya, jika ada kasus seperti itu, kami panggil mahasiswanya untuk diajak berdiskusi atau curhat / Kami tetap menganjurkan dan memotivasi mereka untuk terus melanjutkan kuliah / Kami akan sampaikan kepada mereka: 'Kalau kamu punya prestasi, nanti kami usahakan agar kamu bisa mendapatkan beasiswa lain atau setidaknya mendapatkan keringanan UKT'" (Wawancara 10 Mei 2026, pukul 10.16 WIB).

Bapak Joni menjelaskan:

"Untuk memitigasi mahasiswa yang putus beasiswa KIP Kuliah, pihak universitas melakukan pendekatan langsung dan memberikan kebijakan keringanan administrasi serta tenggang waktu pembayaran. Strategi keberlangsungan studi difokuskan pada pendampingan berkelanjutan melalui koordinasi rutin antara mahasiswa, program studi, dan bagian Kemahasiswaan, agar kendala biaya maupun akademik dapat segera diatasi dan mahasiswa tetap dapat menyelesaikan studinya" (Wawancara 10 Mei 2026, pukul 15.35 WIB).

Bapak Adi Candra menyatakan:

"Kami selalu berusaha melakukan pendekatan personal, terutama ketika mahasiswa sedang dalam kondisi sulit setelah beasiswanya dicabut / Kami memosisikan diri bukan hanya sebagai pengelola beasiswa, tapi juga sebagai tempat mereka berkonsultasi mengenai solusi agar tetap bisa lanjut studi, misalnya dengan membantu mencari opsi keringanan pembayaran atau beasiswa pengganti lainnya" (Wawancara 10 Mei 2026, pukul 14.32 WIB).

Bapak Muhar Jaya menambahkan:

"Kuncinya ada pada pengawasan dan pembinaan yang ketat dari pihak pengelola kampus, yang dibantu langsung oleh Ketua Jurusan (Kajur) dan Wakil Dekan 3. Kontrol ini sangat penting agar kami tahu siapa saja mahasiswa penerima KIP Kuliah yang performanya mulai menurun" (Wawancara 10 Mei 2026, pukul 10.18 WIB).

Dari sisi mahasiswa, Hera mengatakan:

"Walaupun bukan lagi beasiswa tapi pihak kampus selalu membujuk buat tetap lanjut dengan biaya sendiri karena rugi sudah kuliah lama-lama tapi tidak selesai/Dukungan moral dan kelonggaran bayar UKT sangat membantu" (Wawancara 11 Mei 2026, pukul 10.17 WIB).

Sementara Endo menyatakan:

"Kampus tidak menyediakan program proteksi atau mitigasi khusus bagi mahasiswa yang diputus beasiswanya. Kelangsungan kuliah sepenuhnya bergantung pada kemampuan dan usaha mandiri masing-masing mahasiswa agar tidak sampai drop-out / Saya memperketat pengeluaran domestik dan mengandalkan bantuan finansial dari keluarga besar" (Wawancara 9 Mei 2026, pukul 12.30 WIB).

Amina menyatakan:

"Setelah tidak dapat beasiswa, saya harus mengatur keuangan sendiri supaya tetap bisa bayar kuliah tanpa bantuan pihak kampus" (Wawancara 8 Mei 2026, pukul 11.15 WIB). Marsanda Puji menyatakan: "Tidak ada bantuan atau solusi spesifik dari kampus, sehingga saya harus berusaha sendiri agar tetap bisa aktif kuliah sampai tamat" (Wawancara 8 Mei 2026, pukul 15.23 WIB).

Rika menyatakan:

"Saya tetap bertahan kuliah murni karena keinginan pribadi, tanpa ada dukungan khusus setelah beasiswa saya dicabut" (Wawancara 9 Mei 2026, pukul 14.23 WIB).

## **Faktor yang Mempengaruhi**

**a. Faktor Pendukung** Bapak Muhar Jaya menyatakan:

"Bentuk dukungannya ada banyak. Jika ada mahasiswa yang nilainya turun. tetapi mereka punya kemauan kuat untuk tetap kuliah, kami tetap berusaha bantu /Bentuk bantuannya bisa berupa pembebasan biaya UKT dari kampus selama satu semester / Selain dari kampus sendiri, kami juga mengupayakan bantuan beasiswa lain untuk mereka, baik dari perusahaan mitra maupun pihak perbankan" (Wawancara 10 Mei 2026, pukul 10.23 WIB).

Bapak Joni menyatakan:

"Kampus mendukung mahasiswa terdampak melalui kemudahan pembayaran UKT bertahap serta pendampingan motivasi dari pihak kemahasiswaan dan dosen, guna memastikan kendala finansial tidak menghambat studi" (Wawancara 10 Mei 2026, pukul 15.45 WIB).

Bapak Adi Candra menyatakan:

"Kami selalu berusaha melakukan pendekatan personal, terutama ketika mahasiswa sedang dalam kondisi sulit. Kami memposisikan diri bukan hanya sebagai pengelola beasiswa, tapi juga tempat mereka berkonsultasi mengenai solusi agar tetap bisa lanjut studi, misalnya dengan membantu mencari opsi keringanan pembayaran atau beasiswa pengganti lainnya" (Wawancara 10 Mei 2026, pukul 14.40 WIB).

Informan mahasiswa memberikan perspektif lain. Amina menyatakan:

"Setelah tidak dapat beasiswa, saya harus mengatur keuangan sendiri supaya tetap bisa bayar kuliah tanpa bantuan pihak kampus" (Wawancara 8 Mei 2026, pukul 11.20 WIB). Rika menyatakan: "Hanya memberikan dukungan moral kepada saya dan kelonggaran bayar UKT" (Wawancara 11 Mei 2026, pukul 10.23 WIB).

Hera menyatakan:

"Kalo untuk bayaran kuliah kan emang dicicil 3x jadi gak terlalu berat juga kalo dukungan pasti khususnya dari dosen FKIP" (Wawancara 9 Mei 2026, pukul 14.29 WIB).

Endo menyatakan:

"Sejauh ini tidak ada tawaran kompensasi, info beasiswa alternatif, ataupun keringanan khusus dari kampus. Setelah pemutusan, seluruh penyelesaian biaya kuliah murni menjadi tanggung jawab pribadi saya" (Wawancara 9 Mei 2026, pukul 12.37 WIB).

Marsanda Puji menyatakan:

"Saya tidak mendapatkan bantuan informasi beasiswa lain ataupun keringanan pembayaran. Setelah bantuan putus, saya berusaha sendiri untuk tetap melanjutkan kuliah dengan biaya mandiri" (Wawancara 8 Mei 2026, pukul 15.30 WIB).

#### **b. Faktor Penghambat** Bapak Muhar Jaya menjelaskan:

"Secara administrasi sebenarnya tidak ada kendala. Prosesnya otomatis; kami tinggal melaporkan SK pencabutan ke bagian keuangan kampus dan juga melaporkannya secara administratif ke pihak Dikti. Begitu dilaporkan, pihak Dikti akan langsung menghentikan pembiayaan. Proses penghentian dari Dikti ini biasanya langsung diproses dalam beberapa hari saja" (Wawancara 10 Mei 2026, pukul 10.30 WIB).

Bapak Joni menyatakan:

"Pemutusan beasiswa KIP Kuliah menyebabkan hambatan finansial dan administratif yang memaksa mahasiswa bekerja untuk membiayai kuliah secara mandiri. Tekanan ekonomi tersebut berdampak langsung pada penurunan motivasi dan berkurangnya fokus mahasiswa dalam menjalani perkuliahan" (Wawancara 10 Mei 2026, pukul 15.55 WIB).

Bapak Adi Candra menyatakan:

"Hambatan yang sering kami temui adalah ketika mahasiswa merasa putus asa setelah beasiswanya dicabut. Kami harus bekerja ekstra untuk meyakinkan mereka agar tidak berhenti kuliah, namun tantangannya adalah keterbatasan anggaran beasiswa pengganti yang tersedia di kampus" (Wawancara 10 Mei 2026, pukul 14.48 WIB).

Mahasiswa mengeluhkan hambatan finansial. Marsanda Puji menyatakan:

"Tidak ada kendala di sistem, tapi yang menjadi hambatan nyata bagi saya adalah keberatan membayar UKT per semester yang nominalnya sangat besar. Ini cukup mengganggu karena saya harus mencari uang sendiri untuk membayar kuliah, padahal saya belum bekerja" (Wawancara 8 Mei 2026, pukul 15.40 WIB).

Rika menyatakan:

"Meskipun bisa dicicil, proses peralihan dari penerima beasiswa menjadi mahasiswa mandiri tetap menjadi beban administratif tersendiri yang cukup menyita perhatian. Selain itu, keharusan untuk tetap konsisten membayar di tengah keterbatasan dana sering kali menjadi hambatan utama saya dalam fokus belajar" (Wawancara 9 Mei 2026, pukul 14.37 WIB).

Endo menyatakan:

"Hambatan utama adalah beban finansial karena sistem pembayaran langsung beralih ke mandiri. Mengatur alokasi dana untuk biaya kuliah secara mendadak menjadi kendala administratif dan keuangan terbesar bagi saya. Konsentrasi belajar dan pengerjaan tugas kuliah sempat agak terganggu karena perhatian terbagi untuk memikirkan biaya pendidikan" (Wawancara 9 Mei 2026, pukul 12.48 WIB).

Amina menyatakan:

"Kesulitan utama adalah administrasi pembayaran yang harus beralih ke mandiri, ditambah lagi tekanan untuk mencari dana tambahan dalam waktu singkat agar tidak menunggak UKT" (Wawancara 8 Mei 2026, pukul 11.27 WIB).

Hera menyatakan:

*"Bagi saya, kendala utamanya bukan di sistem kampus, tapi bagaimana harus melunasi UKT yang besar dengan kondisi ekonomi yang terbatas setelah tidak ada bantuan KIP" (Wawancara 11 Mei 2026, pukul 10.29 WIB).*

## **Pembahasan**

Pembahasan hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan interpretasi ilmiah dan analitis terhadap temuan data di lapangan mengenai efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH (Unihaz) Bengkulu. Analisis dalam pembahasan ini dieksplorasi secara multidimensional menggunakan pisau analisis teori efektivitas dari Richard M. Steers (1980), yang mencakup dimensi ketepatan sasaran, proses pelaksanaan, dan pencapaian hasil, serta dihubungkan dengan faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungan studi guna mengantisipasi risiko drop-out pasca-pemutusan beasiswa.

### **a. Efektivitas Program KIP Kuliah**

#### **1) Ketepatan Sasaran Penerima**

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa implementasi program KIP Kuliah di Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH masih mengalami kendala dalam hal ketepatan sasaran, khususnya terkait penanganan status beasiswa mahasiswa di tengah jalan yang mengalami perubahan kondisi non-akademik. Secara prosedural, pihak kampus telah memadukan data online (Dapodik/DTKS) dengan verifikasi berkas manual untuk menekan kesalahan penargetan. Namun, pada praktiknya, terjadi proses pemutusan bantuan yang kaku dan sepihak melalui sistem informasi akademik (SIKAD) terhadap mahasiswa yang melakukan pernikahan, tanpa didahului oleh proses pemeriksaan ulang (verifikasi faktual) terhadap kondisi ekonomi riil mereka pasca-menikah.

Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan orientasi antara kepatuhan birokrasi kampus terhadap dokumen kriteria formal makro dengan pengakuan terhadap realitas ekonomi mikrososial mahasiswa di lapangan. Otoritas kampus cenderung menjadikan status hukum perkawinan atau dokumen formal sebagai indikator tunggal yang bersifat mutlak untuk menghentikan bantuan. Akibatnya, manajemen program di tingkat lokal gagal mengidentifikasi dinamika finansial yang dihadapi mahasiswa, sehingga fungsi jaminan pembiayaan pendidikan menjadi tidak responsif terhadap kondisi darurat yang dialami oleh subjek penerima manfaat.

Temuan ini sejalan dengan teori efektivitas dari Richard M. Steers (1980) mengenai optimasi pencapaian tujuan, yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh sejauh mana organisasi mampu mengarahkan tindakannya pada pencapaian substansi tujuan utama, bukan sekadar kepatuhan kaku pada aturan formal. Selain itu, hasil ini juga mendukung penelitian Hamidah, dkk. (2025) yang menemukan kendala serupa pada aspek ketepatan administratif, di mana pemenuhan kriteria ketepatan sasaran kerap terjebak pada dimensi kecocokan legalitas formal (formal compliance) semata dan belum menyentuh esensi keadilan distributif serta kebutuhan ekonomi riil subjek yang diteliti.

#### **2) Proses Pelaksanaan**

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa proses pelaksanaan program KIP Kuliah dari aspek sistem pengawasan akademik telah berjalan optimal melalui pemanfaatan teknologi digital, namun masih memiliki kelemahan serius pada dimensi transparansi dan keadilan prosedural (procedural justice). Otoritas kampus berhasil memanfaatkan grup WhatsApp dan SIKAD untuk mengontrol performa akademik dan batasan IPK mahasiswa. Kendati demikian, proses penyampaian keputusan krusial seperti penghentian beasiswa tidak dibarengi dengan penyerahan dokumen atau Surat Keputusan (SK) resmi secara fisik kepada mahasiswa maupun orang tua, melainkan murni mengandalkan pemutusan sepihak di akun SIKAD.

Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan rigiditas (kekakuan) birokrasi pelaksana di lingkungan universitas yang lebih mengedepankan fungsi kontrol dan sanksi mekanistik daripada fungsi pembinaan yang humanis. Saluran komunikasi digital yang efisien dioptimalkan secara searah demi menegakkan aturan kementerian, tetapi mengabaikan hak-hak prosedural mahasiswa untuk mendapatkan ruang klarifikasi atau mediasi sebelum hak bantuan mereka dicabut sepenuhnya. Ketidakeimbangan operasional ini memicu beban psikologis dan kejutan finansial yang mendadak bagi mahasiswa yang bersangkutan.

Temuan ini sejalan dengan teori efektivitas dari Richard M. Steers (1980) serta diperkuat oleh pemikiran Cairney (2021) dan Peters et al. (2023) yang menyatakan bahwa proses pelaksanaan yang efektif memerlukan keselarasan antara kejelasan saluran informasi dengan perlindungan terhadap hak prosedural agen di lapangan agar tidak melahirkan hambatan administratif. Selain itu, hasil ini juga mendukung penelitian Viola Asiska dan Yohana

Syabila (2025) yang menemukan kendala serupa, di mana efektivitas pelaksanaan program di tingkat lokal sering kali memicu rigiditas birokrasi yang justru mengaburkan esensi transparansi penyampaian keputusan hukum yang berdampak besar bagi kelangsungan studi mahasiswa.

### 3) Pencapaian Hasil

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pencapaian hasil program dalam menekan angka putus kuliah (drop-out) pasca-pemutusan beasiswa di Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH belum menunjukkan kinerja mitigasi institusional yang efektif. Data historis periode 2022–2024 mencatat sebanyak 69 mahasiswa KIP Kuliah mengalami kendala studi atau putus kuliah. Meskipun pengelola mengklaim adanya pendekatan personal dan pemberian bimbingan motivasi, fakta di lapangan menunjukkan tidak adanya skema jaminan proteksi, konversi beasiswa internal, ataupun kebijakan keringanan UKT yang terstruktur dari institusi kampus bagi mahasiswa yang dicabut haknya.

Hal ini disebabkan oleh ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) mitigasi pasca-beasiswa yang baku dan responsif di tingkat universitas. Akibatnya, keberhasilan pencegahan drop-out di lapangan bukan lahir dari efektivitas institutional safety net (jaring pengaman institusional) yang disediakan oleh kampus, melainkan murni disokong oleh tingkat resiliensi ekonomi mandiri dan motivasi intrinsik yang tinggi dari mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa terpaksa melakukan adaptasi ekonomi secara swadaya—seperti mencari pekerjaan paruh waktu (part-time) dan membagi fokus belajar—agar status kemahasiswaan mereka tetap aktif.

Temuan ini sejalan dengan teori efektivitas dari Richard M. Steers (1980) serta penegasan Sutrisno (2019) yang menyatakan bahwa efektivitas hasil jangka panjang suatu program sangat bergantung pada kemampuan sistem dalam merespons kebutuhan riil agen secara berkelanjutan. Selain itu, hasil ini juga mendukung penelitian Wirna Lisa, dkk. (2025) yang menemukan kendala serupa pada aspek pemenuhan kebutuhan finansial, di mana efektivitas program tidak hanya berimbas pada nilai bantuan semata, melainkan memicu keunikan berupa lahirnya resiliensi ekonomi swadaya dari dalam diri mahasiswa untuk menambal financial shock demi mencegah risiko drop-out secara mandiri.

## b. Implementasi Kebijakan Publik

Selain mengukur efektivitas secara organisasi, penelitian ini juga melihat bagaimana program KIP Kuliah diimplementasikan di tingkat perguruan tinggi. Sejalan dengan Cairney (2021), keberhasilan sebuah kebijakan pendidikan tidak hanya bergantung pada regulasi pusat, tetapi sangat bergantung pada kapasitas implementor (pihak kampus) serta koordinasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan dalam menerjemahkan aturan tersebut ke dalam tindakan nyata di lapangan.

## c. Evaluasi Kebijakan Publik

Untuk mengukur sejauh mana dampak program ini bagi keberlangsungan studi mahasiswa, penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan. Merujuk pada Dunn (2018), evaluasi kebijakan digunakan untuk menilai informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi kebijakan bantuan pendidikan. Hal ini relevan dalam menilai efektivitas program KIP Kuliah dalam mencegah *drop-out* mahasiswa pasca-pemutusan beasiswa.

## d. Faktor yang Mempengaruhi

### 1) Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa faktor pendukung utama dalam implementasi program KIP Kuliah di Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH adalah tersedianya komitmen kebijakan internal yang kuat dari pimpinan universitas serta ketersediaan instrumen dukungan akademik yang terstruktur bagi mahasiswa penerima manfaat. Pihak otoritas kampus secara konsisten menerbitkan regulasi proteksi internal, menyelenggarakan program bimbingan intensif, serta mengoptimalkan peran dosen pembimbing akademik dalam memonitor perkembangan studi mahasiswa secara berkala. Upaya institusional ini diarahkan secara terpadu guna memastikan mahasiswa mampu mempertahankan standar capaian pembelajaran yang dipersyaratkan oleh regulasi nasional.

Hal ini disebabkan oleh adanya pemahaman strategis dari pengelola universitas bahwa keberlanjutan alokasi kuota beasiswa KIP Kuliah dari kementerian sangat bergantung pada stabilitas performa indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa di tingkat lokal. Dengan tersedianya kebijakan internal dan sistem bimbingan akademik yang teratur, mahasiswa dibekali wadah konsultasi yang responsif untuk memitigasi hambatan belajar sebelum berdampak

buruk pada penurunan nilai. Kehadiran pendampingan intensif ini berfungsi sebagai akselerator motivasi yang menjaga ritme studi mahasiswa agar tetap berada dalam koridor target kelulusan tepat waktu.

Temuan ini sejalan dengan teori efektivitas dari Richard M. Steers (1980) yang menyatakan bahwa dukungan lingkungan internal organisasi, khususnya ketersediaan sumber daya manusia pelaksana dan kebijakan proteksi yang adaptif, menjadi pilar krusial bagi tercapainya produktivitas kelompok sasaran. Selain itu, hasil ini juga mendukung penelitian Hamidah, dkk. (2025) yang menemukan kendala dan pola serupa, di mana intervensi tata kelola program yang berfokus pada penguatan aspek bimbingan dan pemantauan akademis secara langsung berkorelasi positif dalam mempertahankan kestabilan performa serta capaian prestasi akademik mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi.

## 2) Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa faktor penghambat dalam implementasi program KIP Kuliah di Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH didominasi oleh kendala keterlambatan pencairan dana (baik biaya hidup maupun biaya pendidikan) serta tingginya tuntutan penugasan akademik yang memerlukan biaya tambahan tanpa diimbangi alternatif solusi finansial. Ketika dana bantuan mengalami keterlambatan dari sistem atau bank penyalur, mahasiswa dihadapkan pada situasi kedaruratan ekonomi (financial shock). Kondisi tersebut diperparah oleh beban kurikulum dan observasi lapangan yang menuntut pendanaan mandiri, yang seketika merapuhkan daya dukung finansial mahasiswa, terlebih bagi mereka yang mengalami pemutusan status beasiswa di tengah jalan.

Hal ini disebabkan oleh belum adanya mekanisme jaring pengaman keuangan (financial safety net) yang bersifat otonom dan terstruktur di tingkat universitas untuk mengantisipasi masa-masa kritis jeda pencairan atau pasca-pemutusan beasiswa. Birokrasi kampus cenderung memosisikan diri terbatas sebagai operator administratif penyalur regulasi pusat, tanpa menyiapkan skema dana talangan khusus. Akibatnya, mahasiswa terpaksa membagi konsentrasi dan mengorbankan waktu belajarnya untuk mencari pekerjaan paruh waktu (part-time) demi memenuhi kebutuhan domestik serta biaya praktikum secara mandiri, yang pada akhirnya memicu penurunan performa akademik dan meningkatkan risiko putus kuliah.

Temuan ini sejalan dengan teori efektivitas dari Richard M. Steers (1980) yang menegaskan bahwa hambatan lingkungan eksternal—seperti ketidakpastian pasokan sumber daya material atau finansial dapat secara langsung merusak konsistensi organisasi dalam mencapai target hasil akhir yang optimal. Selain itu, hasil ini juga mendukung penelitian Wirna Lisa, dkk. (2025) yang menemukan kendala serupa pada aspek pemenuhan kebutuhan finansial, di mana ketidakcukupan nilai atau keterlambatan dukungan finansial secara riil terbukti memecah fokus studi mahasiswa, memaksa mereka membagi konsentrasi dengan aktivitas kerja subsisten, dan mendistorsi capaian efektivitas program dalam menjamin keberlangsungan studi

Hasil penelitian menemukan adanya "jurang persepsi" yang tajam antara otoritas kampus dan mahasiswa terkait proses pemutusan beasiswa. Pihak kampus, melalui representasi kabag kemahasiswaan, menekankan bahwa prosedur dijalankan melalui tahapan pembinaan dan koordinasi intensif sebelum keputusan pemutusan diambil. Sebaliknya, sebagian besar informan mahasiswa menyatakan bahwa pemutusan dirasakan terjadi secara otomatis melalui sistem (SIKAD) tanpa adanya ruang dialog atau klarifikasi faktual terkait kondisi ekonomi mereka pasca-perubahan status. Ketidaksiuaian ini mengindikasikan kelemahan pada aspek komunikasi prosedural (*procedural justice*), di mana kebijakan formal tidak tersosialisasikan dengan baik hingga ke tingkat penerima manfaat.

## 4. Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas Program KIP Kuliah di Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH (Unihaz) Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa implementasi program belum berjalan secara optimal dalam menjamin keberlangsungan studi mahasiswa, terutama bagi penerima yang mengalami pemutusan beasiswa. Kesimpulan tersebut dirinci sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran  
Implementasi program masih terjebak pada dimensi kepatuhan legalitas formal (*formal compliance*). Mekanisme verifikasi pasca-perubahan status non-akademik (pernikahan) cenderung kaku dan otomatis melalui sistem, sehingga mengabaikan realitas ekonomi riil mahasiswa dan aspek keadilan distributif.
2. Proses Pelaksanaan  
Meskipun pengawasan akademik berbasis digital telah berjalan optimal, terdapat kelemahan signifikan pada aspek keadilan prosedural (*procedural justice*). Birokrasi kampus lebih mengedepankan sanksi mekanistik

dibandingkan transparansi administratif, terbukti dengan minimnya ruang klarifikasi dan tidak adanya penyerahan SK resmi pasca-pemutusan beasiswa.

3. Pencapaian Hasil dan Mitigasi

Program memiliki daya mitigasi yang rendah terhadap risiko *drop-out* pasca-pemutusan bantuan. Institusi belum memiliki jaring pengaman finansial (*institutional safety net*), sehingga keberlangsungan studi mahasiswa yang dicabut haknya sepenuhnya bergantung pada resiliensi ekonomi dan motivasi intrinsik individu, bukan pada dukungan sistemik kampus.

4. Faktor yang Memengaruhi:

Faktor Pendukung: Komitmen pimpinan universitas dan efektivitas peran dosen pembimbing akademik dalam menjaga stabilitas prestasi mahasiswa menjadi pilar utama keberhasilan program di tingkat lokal. Faktor Penghambat: Ketidakpastian jadwal pencairan dana, beban biaya kurikulum mandiri, dan ketiadaan skema dana talangan oleh universitas menjadi kendala utama yang memicu kerentanan finansial bagi mahasiswa.

### Saran

Guna meningkatkan efektivitas Program KIP Kuliah di masa depan, pihak universitas disarankan untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berbasis *due process of law* yang mewajibkan verifikasi faktual dan transparansi administratif melalui penerbitan surat keputusan resmi sebelum dilakukan penonaktifan status beasiswa. Secara institusional, perlu dirumuskan jaring pengaman finansial (*financial safety net*) yang terstruktur, seperti penyediaan skema dana talangan atau konversi beasiswa internal, serta kebijakan fleksibilitas UKT bagi mahasiswa terdampak untuk menekan risiko *drop-out*. Selain itu, bagi penelitian selanjutnya, direkomendasikan untuk memperluas lokus studi atau menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif guna mengukur secara lebih presisi dampak pemutusan beasiswa terhadap beban psikologis dan produktivitas akademik mahasiswa di perguruan tinggi swasta lainnya di wilayah Provinsi Bengkulu.

## 5. Daftar Pustaka

- Asiska, V., & Syabila, Y. (2025). Analisis efektivitas program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam meningkatkan prestasi akademik mahasiswa. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*.
- Budiani, N. I. (2015). Efektivitas program penanggulangan pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial (Input)*, 2(1).
- Christy, E. N., Latifa, R., Purwatitisari, N., Aprilia, P., & Prabowo, R. (2024). Efektivitas program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 9(2), 134–141.
- Fauzi, M. I. (2025). Evaluasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. *Public Administration Journal (PAJ)*, 9(1), 1–14.
- Hamidah, Jumaidi, & Dharma, A. S. (2025). Efektivitas program KIP-K terhadap prestasi akademik mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA). *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(1), 544–553.
- Lisa, W., Adelia, M., Rhama, B., & Thareq, S. I. (2025). Efektivitas dana KIP-K dalam mendukung pengeluaran mahasiswa angkatan 2023 di Kampus Negeri Palangka Raya. *Jurnal Kajian Pendidikan*, 22(02), 282–295.
- Martins, E. K., & Toletina, N. T. (2024). Evaluasi pelaksanaan kebijakan program KIP-K di Indonesia. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(1), 331–340.
- Penulis, I., Saputra, B. P., & Suryani, E. I. (2025). Implementasi kebijakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam meningkatkan akses pendidikan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, 5(2).
- Purnamasari, N. (2023). *Efektivitas program beasiswa Bidikmisi dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare* [Skripsi/Tesis tidak dipublikasikan].
- Putri, N. K. B. A., Wijaya, K. A. S., & Wirantari, I. D. A. P. (2025). Implementasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka dalam mewujudkan pemerataan pendidikan tinggi (Studi Kasus: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana). *Socio-Political Communication and Policy Review*, 2(3), 1–16.
- Sariri, F., & Prabawati, I. (2024). Evaluasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Negeri Surabaya. *Publika*, 12(1), 238–251.
- Sutrisno, E. (2019). *Manajemen sumber daya manusia*. Prenadamedia Group.

